

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif membuat berbagai kebijakan fundamental yang ditujukan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan itu antara lain terkait dengan sumber daya manusia, pembiayaan, kelembagaan, penyelenggaraan, dan tata kelola lembaga pendidikan, serta partisipasi masyarakat.

Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan, mulai dari amandemen undang-undang dasar tahun 1945, undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan. Berbagai kebijakan ini telah pula di ikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yang lebih operasional.

Seiring dengan berkembangnya tatanan pemerintahan Indonesia, permasalahan dan kebutuhan akan masyarakat semakin kompleks. Untuk menyikapi hal itu, Lembaga Pengembangan Konsultasi Nasional (LPKN) mencoba untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur negara guna menciptakan sebuah institusi yang dapat memberikan pelayanan prima dan efisien kepada masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan tata pemeritahan yang kredibel, adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta BUMN/BUMD.

Dengan adanya masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana ruang lingkup pada pemerintahan pusat maupun daerah serta BUMN/BUMD dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran (*budgeting*) yang di berikan pemerintah dalam bidang pendidikan, dan mengambil judul tugas akhir "IMPLEMENTASI SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS KEGIATAN DIKLAT BERDASARKAN BUDGETING DAN AKTUAL PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONAL (LPKN)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka adanya permasalahan yang berkaitan dengan laporan kas masuk dan keluar berdasarkan *budgeting* dan aktual. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah tentang bagaimanakah metode pencatatan kas masuk dan kas keluar kegiatan diklat berdasarkan *budgeting* dan aktual dan bagaimanakah sistem kas masuk dan kas keluar kegiatan diklat berdasarkan *budgeting* dan aktual pada Lembaga Pengembangan Konsultasi dan Nasional (LPKN).

1.3. Metode Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Metode yang digunakan dalam praktek kerja lapangan ini dibagi kedalam berbagai rangkaian kegiatan, yaitu :

1. Orientasi yang bertujuan untuk mengenal, mengetahui dan mempelajari kegiatan yang terdapat pada perusahaan tempat melaksanakan praktek kerja lapangan.
2. Observasi yang bertujuan untuk dapat melihat dan menemukan suatu permasalahan yang terdapat pada perusahaan tempat melaksanakan praktek kerja lapangan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
3. Pengerjaan praktek kerja, bidang kerja yang menjadi kegiatan adalah sistem informasi akuntansi, data yang didapat akan diolah menjadi laporan praktek kerja atau laporan magang.
4. Konsultasi dan diskusi, konsultasi ini dapat dilakukan dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, sedangkan diskusi dapat dilakukan dengan para tehnsi dan rekan-rekan kuliah.

1.4 Tujuan dan Kegunaan

1.4.1 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai dari praktek kerja lapangan ini adalah :

1. Mengetahui metode penyusunan kas masuk dan kas keluar kegiatan diklat berdasarkan *budgeting* dan aktual pada Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN).
2. Mengetahui sistem kas masuk dan kas keluar kegiatan diklat berdasarkan *budgeting* dan aktual pada Lembaga Pengembangan Dan

Konsultasi Nasional (LPKN)

3. Mengetahui pengendalian intern yang diterapkan dalam penyusunan kas masuk dan kas keluar kegiatan diklat berdasarkan budgeting dan aktual pada Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN).

1.4.2 Kegunaan Praktek Kerja Lapangan

Hasil praktek kerja lapangan ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun penulis berikutnya yang akan melaksanakan studi lebih lanjut berkaitan dengan penyusunan kas masuk dan kas keluar kegiatan diklat berdasarkan *budgeting* dan aktual pada Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN). Sementara itu secara praktis dapat menjadikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasioanl khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan kegiatan diklat berdasarkan budgeting dan aktual yang ada agar pengelolaan dan penggunaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien serta terstruktur.